

Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap *Refugees* Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022

¹Shane Resley Kuhuparuw, ²Christian H J de Fretes, ³Triesanto Romulo Simanjuntak

¹²³Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Korespondensi : pocha8500@gmail.com

Abstrak

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang menjadi isu penting dalam ranah internasional. Hadirnya Indonesia sebagai eksistensi kepedulian terhadap pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa wilayah Timur Tengah khususnya Yordania yang menjadi negara terbanyak untuk menampung pengungsi Palestina. Penelitian ini ditulis untuk melihat bagaimana strategi diplomasi kemanusiaan Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Palestina yang berada di Yordania pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Data yang telah diperoleh menunjukkan bagaimana adanya dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap Palestina. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi dan adapun teori Liberalisme yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

Kata kunci: Diplomasi kemanusiaan, Pemerintah Indonesia, Pengungsi Palestina

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict is a prolonged conflict that has become an important issue in the international sphere. The presence of Indonesia as an existence of concern for Palestinian refugees scattered in several regions of the Middle East, especially Jordan, which is the largest country to accommodate Palestinian refugees. This research was written to see how the Indonesian Government's humanitarian diplomacy strategy towards Palestinian refugees in Jordan from 2018 to 2022. The data that has been obtained shows how there is full support from the Government of Indonesia for Palestine. The method used in this writing is qualitative research with a description approach and the concept of Humanitarian Diplomacy is used to analyze this research.

Keyword: Humanitarian diplomacy, Government of Indonesia, Palestinian refugees.

1. PENDAHULUAN

Konflik yang melatar belakangi sehingga warga Palestina harus melakukan pergerakan perpindahan lintas batas negara adalah konflik antara Palestina dan Israel. Konflik ini merupakan konflik bersejarah yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan dan kekhawatiran masyarakat internasional karena belum menemukan solusi penyelesaian konflik tersebut. Akibat dari konflik ini menyebabkan banyak warga Palestina harus menjadi pengungsi dalam kurun waktu yang cukup lama. Konflik Israel-Palestina bermula sejak pertengahan tahun 1800 an, dimana awal permasalahan dari konflik ini adalah perebutan wilayah teritorial dan warga Palestina yang merasa terhambat dalam memperoleh hak kemanusiaan mereka. Deklarasi Balfour adalah pokok masalahnya, dimana deklarasi tersebut dimaklumkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour pada tahun 1917. Deklarasi tersebut berisi surat mengenai sebuah rencana pembangunan rumah nasional di Palestina untuk para warga Yahudi. Peristiwa deklarasi tersebut kemudian dengan peristiwa Perang Nakba yang adalah perang pertama antara Arab dan Israel. Akibat dari konflik-konflik tersebut tahun 1947 sampai tahun 1949 terjadi pergolakan pengungsi Palestina yang menyebabkan sekitar 750 ribu sampai 900 ribu warga Palestina menjadi terlantar. Pada akhir tahun 2003

diperkirakan ada lebih dari 7 juta warga Palestina yang terlantar, didalamnya termasuk 5,7 juta warga Palestina yang telah mengungsi sejak tahun 1948(Sorong, 2023).

Yordania adalah salah satu negara yang menerima pengungsi dari beberapa negara wilayah Timur Tengah, salah satunya Palestina. Ada sekitar 2,3 juta mayoritas pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania sejak tahun 1948. Oleh karena itu Presiden menginstruksikan untuk mengaktifkan diplomasi kemanusiaan dengan tujuan guna untuk menghadapi krisis akibat dari konflik serta untuk memelihara perdamaian dunia. Tercatat dalam sejarah statistik *United Nation Relief and Work Agency* (UNRWA), terdapat 2,242,579 orang pengungsi yang terdaftar di Yordania pada tahun 2018(UNRWA, 2020).

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh Palestina mendapatkan perhatian melalui komunitas internasional, terkhususnya Indonesia sebagai negara yang mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina sebagai suatu negara yang bebas. Pernyataan mengenai dukungan tersebut sudah ada sejak presiden pertama Indonesia, bapak proklamator Ir. Soekarno yang menyatakan keinginannya untuk mendukung sepenuhnya hak rakyat Palestina(Mukthi M.F, 2014). Melihat Palestina terjajah di tanahnya sendiri oleh Israel, Indonesia mengecam dengan sangat keras terhadap pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan membuat kebijakan luar negeri yang difokuskan untuk mendukung Palestina dalam mencapai hak di tanahnya sendiri. Melalui berbagai pemimpin Indonesia, Palestina selalu mendapatkan dukungan penuh bahkan presiden Joko Widodo sangat menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Semenjak terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia menentukan beberapa isu yang akan difokuskan untuk dibahas dalam forum PBB. Isu mengenai krisis kemanusiaan yang dialami Palestina menjadi salah satu yang diangkat oleh Indonesia dengan tujuan untuk memajukan dan menjembatani serta memprioritaskan kemerdekaan Palestina. Bahkan Menteri Luar Negeri RI yakni Retno Marsudi menegaskan kembali mengenai komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina(Saragih, 2018)

Indonesia juga mengambil bagian perannya dalam konteks diplomasi kemanusiaan. mengenai hal tersebut, salah satu isu diplomasi yang menjadi konsistensi Indonesia dalam upaya diplomasi kemanusiaan merupakan peran aktif Indonesia dalam upaya penanggulangan krisis kemanusiaan terhadap pengungsi Palestina di Yordania. Indonesia merangkul dan menjalin hubungan diplomatik dengan Yordania. Pada tanggal 11 Desember 2017 Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Anyam Safadi di Kantor Kementerian Luar Negeri Yordania, Amman. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas mengenai persiapan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), selain itu membahas koordinasi mengenai langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina. Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo sangat keras dalam mengecam langkah unilateral Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Selain itu, Menlu Retno juga mengajak seluruh masyarakat internasional untuk tetap berkomitmen pada *status quo* yang ditetapkan oleh PBB mengenai status Yerusalem pada saat itu. Menlu Retno mengajak Yordania untuk terus memperkuat perjuangan diplomasi baik secara bilateral atau multilateral, terutama dalam hal mencegah negara lain untuk mengikuti AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel atau memindahkan Kedutaan ke Yerusalem. Dalam hal ini Menlu RI juga meminta bantuan Yordania untuk berperan dalam meyakinkan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukan hal tersebut, dan menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukkan dengan tidak hanya secara politis saja, tetapi juga harus secara konkret dengan terus meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas(Santi, 2017)

Penulis kemudian memfokuskan penelitian terkait diplomasi kemanusiaan Indonesia kepada pengungsi Palestina di Yordania. Kasus *refugees* yang terus meningkat dan menjadi perbincangan bagi para aktor Internasional sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan dalam membantu negara yang mengalami bencana kemanusiaan sekaligus menjaga perdamaian dunia. Dengan demikian penelitian yang

dilakukan merujuk kepada strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap pengungsi Palestina di Yordania dengan tujuan menjaga perdamaian internasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, sebagai suatu metode untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pendekatan deskriptif berfokus terhadap pada suatu permasalahan sebagaimana saat adanya penelitian, lalu hasil penelitian kemudian diolah dan analisis untuk diperoleh kesimpulannya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti jurnal, file buku, artikel ilmiah serta *platform* resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diakses melalui Internet. Fokus dari penelitian ini adalah strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap *Refugees* Palestina di Yordania tahun 2018-2022. Pemilihan tahun 2018-2022 dilakukan karena pengungsi Palestina yang tersebar Yordania mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Konflik yang Terjadi di Israel-Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik bersejarah yang sudah terjadi lebih dari 100 tahun lamanya. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild yakni seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut diberikan sebagai dukungan pemerintah Inggris untuk “mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina”, yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Dampak yang diberikan Deklarasi tersebut melahirkan gerakan Zionis sehingga timbulnya migrasi massal orang Yahudi yang difasilitasi oleh Inggris kepada sebuah negara dengan wilayah yang 90% penduduknya merupakan penduduk asli Arab Palestina, sehingga gelombang migrasi ini mendapatkan perlawanan dari warga Palestina. Konflik Israel-Palestina dimulai sejak akhir abad ke sembilan belas. Negara Israel yang dibentuk pada tanggal 14 Mei 1948, menjadi sebuah pemicu perang pertama antara Arab-Israel, namun perang tersebut berakhir dengan kemenangan Israel pada tahun 1949 sehingga 78% wilayah Palestina berhasil dikuasai. Tercatat sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi di beberapa wilayah yaitu, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Jalur Gaza (Putri, 2023).

Melalui Deklarasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris diatas, memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat Palestina dimana terciptanya konflik antar kelompok zionis yang didukung oleh Amerika dan Uni Eropa terhadap Palestina. Pada kenyataannya, realitas yang terjadi sekarang sangat berbeda dengan syarat saat perjanjian dikeluarkan, yakni agar tidak ada hal-hal yang merugikan atau mengganggu komunitas asal (masyarakat palestina). Bahkan dalam migrasi tersebut mereka telah mempersiapkan angkatan bersenjata jika diperlukan dalam membangun negara Israel di tanah Palestina yang bernama *Israel Defense Force* (IDF). Menanggapi tindakan Israel tersebut, ratusan warga Palestina yang memilih untuk mengungsi di tepi barat dan jalur Gaza bangkit dan melakukan perlawanan pada tahun 1987 yang dikenal sebagai intifada pertama. Pada tanggal 28 September 2000, intifada kedua dimulai sebagai bentuk pemberontakan lanjut Palestina akibat kegagalan yang diperkirakan akan mencapai proses perdamaian antara Israel-Palestina. Dinamika eskalasi konflik terus terjadi dan agresi militer yang sulit dihindari mengakibatkan proses perdamaian sulit untuk dicapai pada wilayah tersebut hingga saat ini.

Setelah berakhirnya intifada terlihat bahwa, Israel memberikan dampak kerusakan baru yang sebelumnya belum pernah dialami oleh Palestina seperti, kerusakan yang terjadi pada infrastruktur hingga merambat pada perekonomian. Upaya perdamaian telah banyak diinisiasi oleh banyak pihak dan belum mendapatkan hasil yang sempurna dikarenakan kurangnya minat dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik untuk berdamai (Byman, 2018)

Pada bulan Juli 2014, kondisi mulai memanas ketika konfrontasi militer terjadi antara militer Israel dan Hamas di wilayah Palestina. Konflik tersebut berakhir dengan jumlah korban yang didominasi oleh Palestina, sebanyak 2.251 warga Palestina terbunuh di wilayah tersebut. Kekerasan serta konflik bersenjata terus berlanjut namun dengan korban dengan skala yang tidak besar (Yourish and Keller, 2014). Pada awal tahun 2018, Militer Israel kembali melakukan serangan terhadap Palestina, sebanyak 183 warga Palestina terbunuh dan 6.000 warga lainnya terluka. Setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut, pasukan Hamas dan Israel saling melakukan serangan sehingga suasana politik yang semakin tegang mengakibatkan kembalinya perpecahan antara kedua fraksi partai Palestina (Alsaafin and Tahhan, 2017). Konflik antara Israel- Palestina tidak dapat dihentikan dan terus berlanjut hingga tahun 2022. Eksistensi yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang didominasi oleh Palestina sehingga memilih untuk mengungsi ke beberapa wilayah timur tengah lainnya dan Yordania menjadi salah satu negara yang menjadi tempat paling terbanyak untuk menampung pengungsi Palestina.

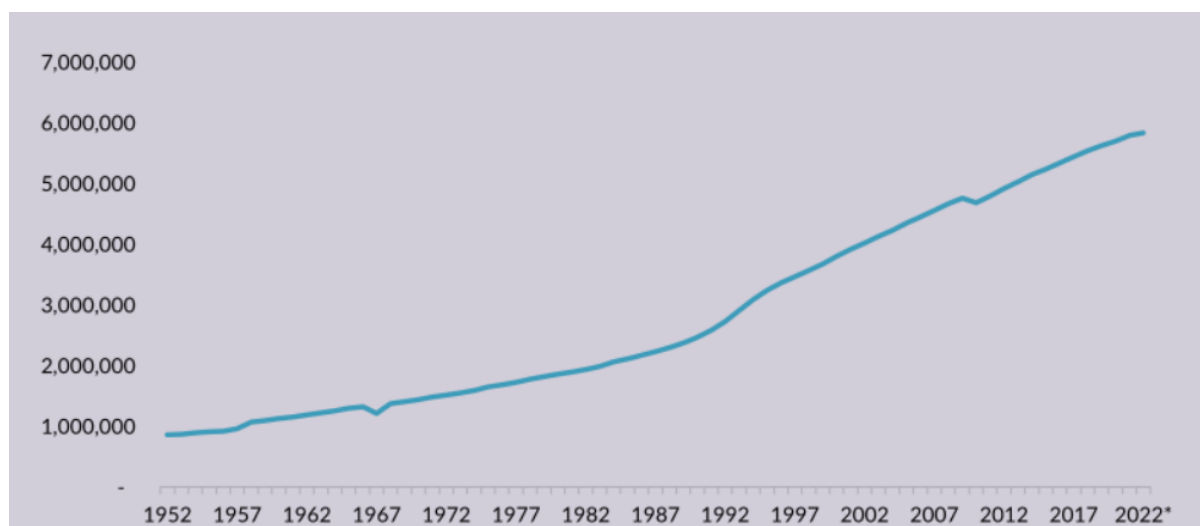


Figure 1. Number of Palestinian Refugees, 1952-2022. Source : (UNHCR, 2023)

Melalui data statistik yang diperoleh melalui *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), memberikan hasil mengenai pengungsi Palestina yang secara signifikan sebagian besar mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah pengungsi yang sangat besar menjadi sebuah permasalahan yang konkret terhadap beberapa wilayah di Timur Tengah.

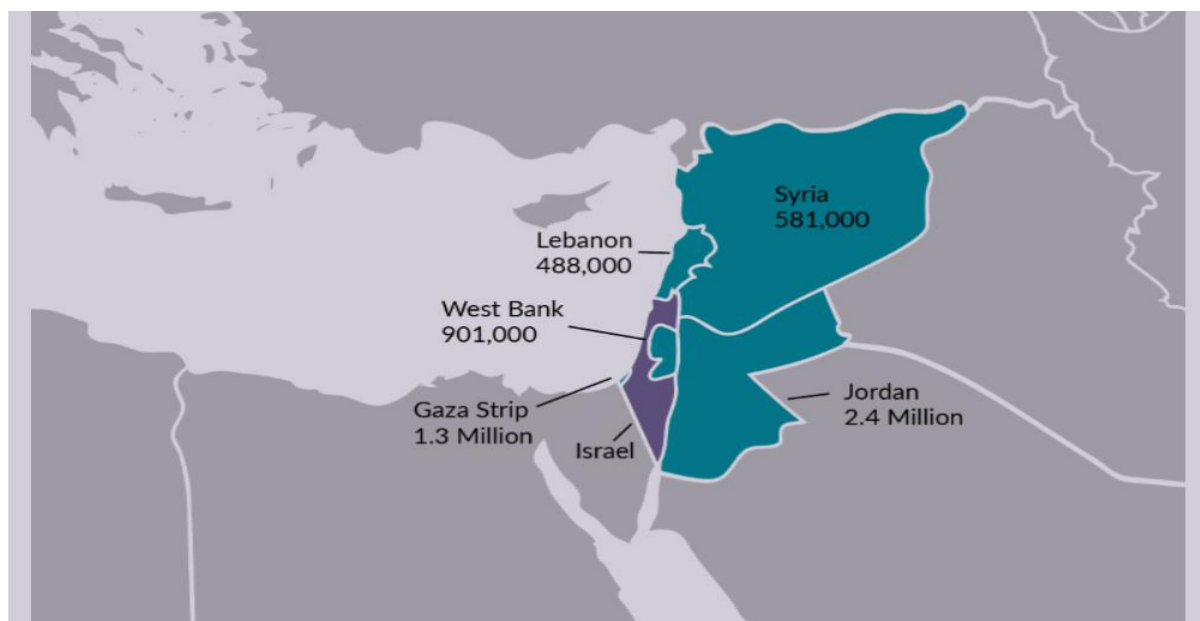


Figure 2. Map of Palestine Refugees, by Country of Residence, 2022. Source : (UNRWA, 2023)

Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh melalui *United Nation Relief and Work Agency* (UNHCR) dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2022 populasi pengungsi Palestina mengalami lonjakan di beberapa wilayah Timur Tengah. 5,9 juta pengungsi Palestina yang terdaftar, sebanyak 40% tinggal di Yordania. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yordania menjadi tuan rumah bagi jumlah pengungsi Palestina terbanyak. Tentunya dengan jumlah tersebut pengungsi Palestina mengalami kesulitan untuk tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak di Yordania.

Dengan banyaknya populasi Palestina yang mengungsi di Yordania, tentunya memberikan beberapa tantangan terhadap pemerintah Yordania seperti, terbatasnya kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga timbulnya tingkat kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya, tingginya biaya pendidikan bagi pengungsi yang tidak memperoleh jaminan sosial, serta ketegangan terhadap penduduk setempat. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kondisi kehidupan antara pengungsi yang tinggal di kamp dan pengungsi yang tinggal di luar kamp, dimana pengungsi yang tinggal di luar kamp memiliki keluarga yang lebih besar, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan kesehatan yang lebih baik. Pengungsi juga menghadapi pembatasan pendidikan tinggi dan pekerjaan karena status asing mereka, meski memiliki dua paspor tanpa nomor nasional. Selain itu, tantangan ekonomi di Yordania, termasuk utang negara yang tinggi, memperburuk kesulitan yang dihadapi para pengungsi Palestina. Tantangan-tantangan ini diperburuk oleh fakta bahwa pengungsi Palestina tidak tercakup dalam Konvensi Pengungsi Jenewa tahun 1951 karena Yordania belum meratifikasinya. Sebaliknya, mereka mendapat dukungan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA). Permasalahan utama yang menjadi salah satu tantangannya yaitu, mengenai para pengungsi yang tinggal di kamp-kamp mengalami kepadatan penduduk serta masalah struktural, dibandingkan pengungsi yang berada diluar kamp pada umumnya memperoleh pilihan tempat yang lebih baik. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi pengungsi Palestina di Yordania beragam dan mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial serta memerlukan dukungan dan solusi komprehensif (Anera, 2019)

Pemerintah Yordania menghadapi beberapa tantangan terkait pengungsi Palestina. salah satu tantangannya adalah masalah ekonomi yang serius dengan utang nasional sebesar \$35 miliar, setara dengan

95 persen PDB negara tersebut Selain itu (Ministry of Finance, Jordan, 2021), pemerintah Yordania juga menghadapi masalah kewarganegaraan karena para pengungsi Palestina diberikan paspor tanpa nomor kewarganegaraan, sehingga mereka tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak seperti SIM, hak kepemilikan, hak untuk memilih (Girit 2024). Tantangan lainnya adalah masalah kesehatan, ruang dan kebersihan di kamp-kamp pengungsi Palestina, yang memerlukan penyediaan lebih banyak ruang dan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan (Anera, 2020)

Alasan Indonesia membantu Palestina di Yordania dikarenakan adanya ikatan politik, sejarah, teologis, dan kemanusiaan yang erat dengan Palestina. Apabila dijelaskan secara politik, Indonesia telah mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina sejak tahun 1947, dengan mendirikan kedutaan besar di Amman, Yordania, yang merangkap Palestina, serta didirikannya kedutaan besar Palestina di Jakarta. Selain itu Indonesia juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat Palestina yang terkena dampak konflik termasuk bantuan medis, makanan, dan keuangan untuk proyek pembangunan infrastruktur utama di Palestina. Secara historis, Palestina mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara *de facto* pada tahun 1944, dan Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Faktor teologis dan kemanusiaan juga menjelaskan eratnya hubungan Indonesia dan Palestina. Solidaritas Indonesia terhadap Palestina merupakan wujud solidaritas terhadap negara-negara Islam lainnya. Oleh karena itu, Indonesia terus konsisten mendukung Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina di Yordania. Melalui konteks tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Yordania sepenuhnya mendukung dan bekerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Humas, 2023).

Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan kepada Palestina

Berdasarkan konflik yang telah terjadi selama 100 tahun lebihnya yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang lebih dominan terhadap warga Palestina. Warga Palestina yang selamat dari konflik tersebut, secara terpaksa memilih untuk melarikan diri serta mengungsi ke beberapa wilayah Timur Tengah, dan salah satu negara yang menjadi tempat penampungan terbesar yaitu Yordania. Dengan munculnya para pengungsi Palestina terhadap jumlah yang sangat besar, tentunya hal tersebut menjadi isu yang sangat serius dalam ranah nasional maupun internasional. Bagi Indonesia, isu mengenai pengungsi Palestina merupakan fenomena yang menarik perhatian. Diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap Palestina dilakukan dalam bentuk berupa materi maupun jasa. Dalam menjalankan diplomasinya terhadap Palestina, Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi juga menjalin hubungan kerja sama dengan Yordania.

Pada tanggal 5 Maret 2019 Menlu RI berkunjung kembali ke Yordania dimana hal tersebut merupakan kunjungan ke empat Indonesia di Yordania dalam kurun waktu dua tahun. Dalam pertemuan tersebut, selain membahas kerjasama bilateral ekonomi, kedua menlu juga membahas secara khusus bagaimana situasi Palestina saat itu. Menlu RI menyampaikan berbagai langkah yang dilakukan dalam upaya Indonesia untuk membantu rakyat Palestina, baik bantuan secara politis maupun secara ekonomi. Bantuan yang diberikan pemerintah dalam mendukung perekonomian Palestina adalah dengan memberlakukan tarif nol persen untuk beberapa produk ekspor Palestina ke Indonesia, yaitu produk minyak zaitun dan kurma. Selain itu, lewat program peningkatan kapasitas Indonesia telah memberikan sekitar US\$ 12 juta kepada pejabat dan non pejabat Palestina. Menlu RI juga mengatakan tentang pelaksanaan Palestina week di Jakarta dan Bandung yang dilakukan pada bulan Oktober 2018, dimana hal tersebut menunjukkan dukungan yang kuat dari masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Namun sebelum melakukan pertemuan dan pembahasan mengenai kerjasama tersebut, Menlu RI telah terlebih dahulu membuka sebuah pelatihan, yakni Pelatihan Internasional bagi Para Pelatih Mengenai Perencanaan Usaha Terhadap Kaum Perempuan di Tempat Pengungsian (*International Training of Trainers in Business Planning for Women in Refugees Camps*). Selain itu pada saat yang sama, Menlu RI telah melaksanakan penandatanganan LOI

antara Indonesia dan Palestina mengenai pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina terkait dengan pengadaan desalinasi air dan obat-obatan serta peralatan kesehatan. Terkait pelatihan yang diadakan tersebut merupakan bagian serta wujud dari program pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina dalam perjuangan mereka membangun bangsa. Bentuk kepedulian dan upaya bantuan lainnya yang dilakukan Menlu RI yaitu, mengadakan pertemuan dengan Komisioner Jendral UNRWA (*The United Nation Relief and Works for Palestine Refugees in the Near East*) dalam rangka menandatangani MoU mengenai distribusi kontribusi kemanusiaan pemerintah Indonesia bagi pengungsi Palestina ex-Gazan di Jerash Camp Yordania dengan jumlah sebesar US\$ 1 juta. Setelah itu Menlu RI juga melakukan kunjungan ke tempat penampungan para pengungsi, yaitu, *New Amman Camp*, dan menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan terus mengupayakan dan memperkuat koordinasi dengan Yordania dalam hal upaya bantuan kemanusiaan kepada Palestina, dimana Yordania merupakan salah satu negara yang telah banyak membantu Palestina dalam berbagai aspek termasuk salah satunya bagi para pengungsi dalam bantuan untuk melangsungkan kehidupan yang layak. Indonesia dan Yordania sepakat untuk terus saling mendorong kerjasama dan koordinasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya (Andriana, 2019).

Bantuan berikutnya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Palestina di Yordania berupa klinik mata (*Ophthalmology Clinic*) yang diresmikan dan diserahkan pada tanggal 21 April 2019 kepada MAP Yordania (*Medical Aid for Palestinian Clinic*) yang berada di kamp pengungsi Palestina di Talbiyah. Bantuan klinik tersebut merupakan kerjasama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dengan JHCO (*Jordan Hashemite Charity Organization*), dengan melalui dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Baznas. Bantuan ini merupakan tahap awal kerjasama antara kedua organisasi tersebut, dalam bantuan tersebut lebih mengutamakan sektor kesehatan melalui tiga unit klinik yang dikelola oleh MAP Yordania di kamp pengungsi Gaza, kamp Hattien, dan kamp Talbiyah. Pada tanggal 7 Januari 2019, Baznas telah mendistribusikan bantuan sebesar US\$ 150 ribu yang adalah dana kemanusiaan berupa obat-obatan kepada MAP klinik yang berada di kamp pengungsi Gaza di Jerash yang diserahkan melalui Dubes RI Amman. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini merupakan tindakan lanjutan atas kerjasama antara JHCO yang ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2018 di Jakarta, dengan saksi Menlu RI, Retno Marsudi dan Menlu Palestina, Riad Malki. Respon dari Pangeran Hassan Bin Talal terkait bantuan tersebut adalah menurut beliau, kehadiran Baznas di tempat pengungsi tidak hanya sekedar untuk memberi bantuan, tetapi lebih terpanggil karena adanya rasa tinggi solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina dan juga adanya hubungan yang sangat erat dengan Yordania. KBRI amman sendiri merespon dengan sangat baik dan mengapresiasi atas peran langsung dari Baznas yang menjalin kerjasama dengan JHCO dalam hal mendukung kegiatan diplomasi kemanusiaan yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri RI (Kemlu, 2019).

Selain bekerjasama dengan JHCO, Baznas juga menjalin hubungan kerjasama dengan UNRWA (United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Dalam tahap awal kerjasama kedua organisasi tersebut, mereka telah menyalurkan bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia sebesar US\$ 150 ribu, dimana program kerjasama tersebut lebih difokuskan pada program pendidikan anak-anak pengungsi Palestina. Bantuan selanjutnya merupakan wujud kontribusi bagi kemanusiaan yang diberikan pemerintah Indonesia berupa sebuah unit ambulans atau *Medical Transportation Unit*, yang diserahkan oleh Dubes RI, Andy Rachmianto ke kamp pengungsi Palestina di Talbiyah, Amman, yang menampung sekitar 25 ribu pengungsi. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan inisiatif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bekerjasama dengan JHCO dan MAP, dengan mengumpulkan dana dari sejumlah industri farmasi dan makanan yang ada di Indonesia. Dana tersebut terkumpul dengan jumlah sebesar US\$ 17 ribu dari hasil kegiatan tersebut. Selain dana yang dialokasikan untuk pembelian *medical unit*, dengan adanya dana yang tersisa akan digunakan untuk membeli bantuan berupa bahan-bahan pokok, perlengkapan musim dingin, dan peralatan kesehatan untuk

kamp-kamp lainnya. Penyerahan bantuan tersebut juga merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan Indonesia sebagai salah satu program prioritas KBRI Amman dalam hal membantu para pengungsi di Yordania(Suhartono, 2019). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan terhadap Palestina pada tahun 2020. Komitmen tersebut merupakan wujud rasa kemanusiaan serta kepedulian Indonesia atas penderitaan Palestina dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, dan juga dalam ancaman perluasan aneksasi Israel(Humas, 2020).

Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI Amman, Yordania melakukan kerjasama dengan dua lembaga swadaya masyarakat, yaitu “Nusantara Palestine Centre” (NPC) dan “Sahabat Palestina Memanggil” (SPM) melaksanakan penggalangan dana serta bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina di Yordania. Aktivitas kemanusiaan tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi beban ekonomi dan sosial para pengungsi dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dan menunaikan ibadah puasa Ramadhan. Pada tanggal 17 – 18 Mei 2020, bersama dengan JHCO menyalurkan sekitar 600 paket sembako kepada pengungsi Palestina di kamp Talbiyah. Kegiatan tersebut juga disaksikan dan diserahkan secara langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto(Mahayana, 2020). Pada tahun 2020, Baznas memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Palestina sebesar Rp66,037,000.00 yang terdiri dari Rp26,037,000.00 dana yang diperoleh melalui zakat berupa paket musim dingin untuk pengungsi Palestina dan Suriah di Yordania, serta Rp40,000,000.00 dana yang diperoleh melalui infak dan sedekah sebagai penyaluran biaya hidup terhadap pengungsi Palestina melalui *Jordan Heshemite Charity Organization (JHCO)*(Ridha, Ibdalsyah, and Ayuniyyah, 2022).

Berdasarkan video yang dilansir melalui (Official iNews, 2021) dijelaskan bahwa, Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Palestina dan Suriah di provinsi Mafrqa, Yordania. Bantuan ini diberikan melalui relawan Indonesia dengan himpunan mahasiswa yang berupa bahan-bahan makanan berupa 6 ton beras serta kebutuhan medis seperti obat-obatan dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi pada masa pandemic *Covid-19*. Bantuan kemanusiaan ini juga akan terus didistribusikan hingga 5 Februari 2021.

Sebagai bentuk konkret persaudaraan Indonesia dan Palestina, KBRI Amman mengunjungi kamp Palestina di Zarqa, Yordania pada 23 Maret 2022. Dalam kunjungan tersebut, KBRI Amman menyalurkan 75 paket kebutuhan hidup sehari-hari. Amman juga telah membagikan obat-obat ke Medicine Aids for Palestine (MAP) yang memiliki tugas untuk mengelola klinik-klinik di kamp tersebut. Menurut Informasi yang diberikan *Jordan Heshemite Charity Organization*, kamp tersebut merupakan kamp yang paling terkena dampak berat akibat pandemic *Covid-19*. Pada 5 November 2022, Nusantara Palestine Center (NPC) melakukan kerjasama dengan *Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO)* yang difasilitasi oleh KBRI Amman, kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 1.109 paket sembako serta bantuan yang diperlukan untuk musim dingin berupa selimut hangat sebanyak 2.218 senilai Rp. 1,35 Miliar. Bantuan ini diberikan kepada pengungsi Palestina yang berada di kamp pengungsi Gaza di wilayah Jerash, Yordania(Kemlu, 2022).

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia beserta Baznas dari tahun 2018 sampai 2022 bersifat fluktuatif. Berdasarkan bantuan yang telah diberikan pemerintah Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 terlihat memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2020 hingga tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam masa pandemi *Covid-19*, terkhususnya Baznas pada masa pandemi lebih difokuskan untuk mengelola bantuan didalam negeri. Mengenai strategi bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diperlihatkan bahwa Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa organisasi yakni, JHCO, NPC, MAP dalam menyalurkan bantuan yang dikhususkan untuk membantu pada pengungsi Palestina di Yordania. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia baik dalam bidang ekonomi, pangan, serta kesehatan dinilai sangat bermanfaat

terhadap penungsi Palestina. Indonesia juga melakukan pelatihan perencanaan usaha terhadap perempuan dengan tujuan memihikan ekonomi Palestina

Relevansi Penelitian dengan Teori Liberalisme

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori Liberalisme yang memiliki pemahaman bahwa individu memiliki kebebasan yang dimana masyarakat tidak memiliki batasan untuk menjalankan kehidupan baik dalam aspek agama hingga batasan oleh pemerintahan, dengan pertanggungjawaban yang dipegang oleh masing-masing individu tersebut. Dengan adanya kebebasan tersebut manusia akan mengembangkan berbagai ide hingga membentuk sebuah komunitas yang dapat memunculkan kontrak sosial dalam masyarakat. Tentunya disamping itu terdapat perbedaan ide yang tetap dipegang dengan sikap pluralisme agar sikap saling menghargai satu dengan yang lain dapat ditanamkan. Pemahaman Immanuel Kant mengenai liberalisme bahwa jika setiap negara memiliki rasa saling percaya juga saling menghargai maka negara tersebut mampu bekerjasama dalam suatu hubungan internasional sehingga akan tercipta satu titik yang disebut *perpetual peace* (Jackson and Sorensen, 1999 : 177)

kerjasama antar negara sebagai jalan untuk menuntaskan permasalahan pengungsi Palestina di beberapa negara Timur Tengah dengan melakukan hubungan diplomatik terhadap beberapa negara seperti kerjasama yang dibangun oleh Indonesia dan Palestina dalam dukungan kemerdekaan Palestina hingga bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui Yordania melalui hubungan bilateral yang dibangun sebelumnya. Disamping itu organisasi Melihat berdasarkan kajian teori diatas khususnya dalam penggunaan teori untuk menganalisis studi kasus tersebut, penulis menggunakan teori liberalisme sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan pada kasus pengungsian tersebut. Melalui ide pokok pemikiran teori liberalisme yang dimana bahwa kepercayaan perdamaian dunia dapat dicapai melalui adanya kerjasama antar negara. Pemahaman kaum liberalisme mengenai kerjasama antar negara sangat terlihat melalui kebiasaan masyarakat atau individu yang memiliki kepercayaan dalam bekerja sama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya hingga menciptakan sebuah perdamaian dan diterapkan oleh aktor negara yang cenderung tidak menyukai adanya konflik atau perang. Permasalahan dalam studi kasus diatas diperlihatkan bahwa kerjasama antara negara sangat dibutuhkan untuk hingga mengkampanyekan rencana bantuan mereka dalam ranah internasional agar negara yang lain dapat tergerak dalam membentuk sebuah komunitas dalam menuntaskan masalah tersebut. Sebagaimana dalam kasus tersebut Indonesia sebagai negara yang demokratis cukup berperan aktif dalam melakukan bantuan kemanusiaan baik bantuan tersebut dilakukan oleh pemerintah maupun melalui masyarakat yang memiliki inisiatif dalam membentuk sebuah komunitas dalam aksi bantuan kemanusiaan. Tentunya Indonesia menerapkan sistem perdamaian dunia hingga organisasi internasional lainnya ikut berperan dalam menuntaskan permasalahan internasional tersebut, yang dimana mereka berperan sebagai sumber bantuan hingga saluran bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Relevansi antara studi kasus dengan teori liberalisme dapat dilihat secara jelas bagaimana problematika internasional yang sedang terjadi dapat dituntaskan secara bertahap melalui pemahaman liberalisme yang dimana kerjasama antar negara sangat dipercaya akan menciptakan perdamaian dunia. pemahaman tersebut dapat dilihat melalui salahsatu dari para ahli teori liberalism yaitu Immanuel Kant memahami bahwa jika setiap negara memiliki rasa saling percaya juga saling menghargai maka negara tersebut mampu bekerjasama dalam suatu hubungan internasional sehingga akan tercipta satu titik yang disebut *perpetual peace*. Hubungan diplomatik yang dibangun oleh Indonesia oleh Yordania dan Palestina sangat berdampak besar dalam aktivitas bantuan kemanusiaan.

4. KESIMPULAN

Strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat berdampak baik terhadap pengungsi Palestina di Yordania. Praktik diplomasi yang dilakukan Indonesia menjadi salah satu bentuk kepedulian dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap Palestina. Isu mengenai konflik Israel-Palestina menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius samapai saat ini. Indonesia juga tidak hentinya menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam berbagai aspek yang mengartikan bahwa Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga membangun kerjasama yang baik Bersama Yordania dan Palestina serta beberapa organisasi yang dikhususkan untuk menyalurkan bantuan yang diberikan terhadap Palestina di Yordania. Adanya penurunan kapasitas bantuan yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang diakibatkan pandemic *Covid-19*, akan tetapi terus meningkat sampai saat ini.

5. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta rujukan terhadap peneliti atau pembaca selanjutnya untuk menambah wawasan terkait dengan Diplomasi kemanusiaan yang telah diberikan Indonesia pada tahun yang telah ditentukan. Adapun harapan dan saran yang dapat diberikan untuk pemerintah Indonesia adalah tetap menjalankan strategi diplomasi kemanusiaan yang sudah dijalankan agar korban konflik Palestina yang berada di Yordania dapat hidup dengan layak serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh untuk menuju kemerdekaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alsaafin, linah, and Zena A. Tahhan. 2017. "Why Fatah and Hamas Won't Reconcile." *ALJAZEERA*. Retrieved January 25, 2024 (<https://www.aljazeera.com/features/2017/9/21/why-fatah-and-hamas-wont-reconcile>).
- [2] Andriana, Maria D. 2019. "Indonesia-Yordania Dorong Kerja Sama Dukung Perjuangan Palestina." *ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA*. Retrieved May 25, 2023 (<https://www.antaranews.com/berita/806072/indonesia-yordania-dorong-kerja-sama-dukung-perjuangan-palestina>).
- [3] Anera. 2019. "Seperti Apa Kondisi Kamp Pengungsi Palestina?" *Anera WHERE HOPE FINDS A AWAY*. Retrieved April 13, 2024 (<https://www.anera.org/blog/what-are-palestinian-refugee-camp-conditions-like/>).
- [4] Anera. 2020. "Sistem Kesehatan Di Palestina." *Anera WHERE HOPE FINDS A AWAY*. Retrieved March 13, 2024 (<https://www.anera.org/blog/healthcare-in-palestine/>).
- [5] Byman, Daniel. 2018. "The Oslo Accords at 25, the Second Intifada at 18." *Brookings*. Retrieved February 22, 2024 (<https://www.brookings.edu/articles/the-oslo-accords-at-25-the-second-intifada-at-18/>).
- [6] Girit, Selin. 2024. "Berapa Banyak Pengungsi Palestina Di Dunia Dan Seberapa Besar Diaspora Palestina?" *BBC NEWS INDONESIA*. Retrieved December 27, 2023 (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnkdd5l2d70o>).
- [7] Humas. 2020. "Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Bantuan Untuk Palestina Di Tahun 2020." *SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved May 8, 2023 (<https://setkab.go.id/pemerintah-ri-tingkatkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-palestina-di-tahun-2020/>).

- [8] Humas, Admin. 2023. "Persaudaraan Erat Indonesia Dan Palestina." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Retrieved March 13, 2024 (<https://www.radenintan.ac.id/persaudaraan-erat-indonesia-dan-palestina/>).
- [9] Jackson, Robert, and Goerg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*.
- [10] Kemlu. 2019. "Bantuan Kemanusiaan Indonesia Untuk Pengungsi Palestina Di Yordania." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved May 19, 2023 (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/207/berita/bantuan-kemanusiaan-indonesia-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania>).
- [11] Kemlu. 2022. "Indonesia Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Pengungsi Palestina Di Jerash, Yordania." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved March 19, 2024 (<https://rabat.kemlu.go.id/portal/id/read/4120/berita/indonesia-kembali-salurkan-bantuan-kemanusiaan-bagi-pengungsi-palestina-di-jerash-yordania>).
- [12] Mahayana, Mellani Eka. 2020. "Indonesia Bersama Palestina Di Tengah Pandemi Covid-19." *RM.Id Rakyat Merdeka*. Retrieved February 11, 2024 (<https://rm.id/baca-berita/internasional/35808/indonesia-bersama-palestina-di-tengah-pandemi-covid19>).
- [13] Ministry of Finance JORDAN. 2021. "Yordania - Nilai Utang Pemerintah Dibandingkan Dengan PDB." *Trading Economics*. Retrieved April 18, 2024 (<https://id.tradingeconomics.com/jordan/government-debt-to-gdp>).
- [14] Mukthi M.F. 2014. "Sukarno Dan Palestina." *Historia MASA LAMPAU SELALU AKTUAL*. Retrieved January 10, 2024 (<https://historia.id/politik/articles/sukarno-dan-palestina-Dw5OP/page/1>).
- [15] Official iNews. 2021. *Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Palestina Dan Suriah*. Indonesia: www.youtube.com.
- [16] Putri, Rindi S. 2023. "Kronologi & Penjelasan Awal Sejarah Konflik Israel-Palestina." *CNBC INDONESIA*. Retrieved February 21, 2024 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231125141124-4-491989/kronologi-penjelasan-awal-sejarah-konflik-israel-palestina>).
- [17] Ridha, Muhammad Abdi, Ibdalsyah, and Qurroh Ayuniyyah. 2022. "Analisis Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Palestina Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2018-2021." *Journal IPB* 10:177–78. doi: 10.29244.
- [18] Santi, Natalia. 2017. "Indonesia Gandeng Yordania Dalam Diplomasi Soal Palestina." *CNN INDONESIA*. Retrieved January 15, 2024 (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171211175637-120-261643/indonesia-gandeng-yordania-dalam-diplomasi-soal-palestina>).
- [19] Saragih. 2018. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi." *Jurnal Kajian Kesilaman Dan Kemasyarakatan* Vol. 3,(No. 2.):136.
- [20] Sorongan, Tommy Patrio. 2023. "Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang Hingga Akhir Zaman?" *CNBC INDONESIA*. Retrieved (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224103055-4-500024/sejarah-konflik-israel-palestina-perang-hingga-akhir-zaman>).
- [21] Suhartono, Anton. 2019. "Pemerintah RI Serahkan Bantuan Mobil Ambulans Untuk Pengungsi Palestina." *INews.Id*. Retrieved April 27, 2023 (<https://www.inews.id/news/internasional/pemerintah-ri-serahkan-bantuan-mobil-ambulans-untuk-pengungsi-palestina>).
- [22] UNHCR. 2023. "Refugee Data Finder." *The UN Refugee Agency*. Retrieved February 27, 2024 (<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=3f2Du6>).
- [23] UNRWA. 2020. "Total Palestinian Refugees (1950-Present)." *Jewish Virtual Library A Project of Aice*. Retrieved November 5, 2023 (<https://www.jewishvirtuallibrary.org/total-palestinian-refugees-1950-present>).

- [24] UNRWA. 2023. "UNRWA REGISTERED POPULATION DASHBOARD." *UNRWA for Palestine in the Near East*. Retrieved February 27, 2024 (<https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-and-social-services/unrwa-registered-population-dashboard>).
- [25] Yourish, Karen, and Josh Keller. 2014. "The Toll in Gaza and Israel, Day by Day." *The New York Times*. Retrieved January 17, 2024 (<https://www.nytimes.com/interactive/2014/07/15/world/middleeast/toll-israel-gaza-conflict.html>)